

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata nasional memiliki peranan penting bagi negara sesuai dengan perkembangan dan kontribusi yang telah diberikan oleh sektor pariwisata terhadap penerimaan devisa, pengembangan wilayah, pendapatan daerah, penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha yang banyak tersebar diberbagai wilayah (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, 2018). Oleh karena itu, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dalam perekonomian dunia. Hal ini karena sektor pariwisata berhasil memberikan beberapa keuntungan bagi negara. Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), sektor pariwisata telah menyumbang sebesar 9% dari total GDP dunia. Pada tahun 2014, sektor pariwisata telah menyumbang sebesar 6% dari total ekspor dunia atau sebesar US\$ 1.5 triliun (Sabon, 2018).

Berhasil dan majunya sektor pariwisata dalam suatu negara tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah di dalamnya. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan pengembangan dan peningkatan konsentrasi terhadap sektor pariwisata. Terlebih sektor pariwisata di Indonesia yang memiliki potensi yang besar bagi perekonomian negara

dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik oleh pemerintah pusat dan masing-masing pemerintah daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama daerahnya adalah Kabupaten Pangandaran.

Pangandaran merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Barat yang terkenal dengan wisata pantainya seperti Pantai Batu Karas, Pantai Karapyak, Pantai Madasari, Pantai Pasir Putih dan Pantai Batu Hiu. Selain wisata pantai, Pangandaran juga memiliki berbagai macam kawasan wisata lainnya seperti *Green Canyon*, Cagar Alam Pananjung, *Green Valley* Citumang, Curug Taringgul, Pepedan Hills, Curug Jambe Anom, serta Goa Sinjang Lawang (Shidqiyyah, 2019). Pangandaran merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang datang berkunjung sebanyak 1.988.390 jiwa. Jumlah wisatawan ini mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 2.955.159 jiwa. Pada tahun 2018, Pangandaran kembali mengalami peningkatan jumlah wisatawan dua kali lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.044.204 jiwa. Berikut tabel data jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Pangandaran:

Tabel 1.1

Jumlah Kunjungan Wisatawan 2016-2018

Tahun	Jumlah Wisatawan
2016	1.988.390
2017	2.955.159
2018	4.044.204

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata kelas dunia, Pemerintah Kabupaten Pangandaran saat ini sedang melakukan pembenahan atau penataan disekitar kawasan wisata di Kabupaten Pangandaran secara bertahap. Tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan cara meyakinkan terlebih dahulu masyarakat Pangandaran bahwa pariwisata merupakan sebuah kegiatan atau pola kebijakan yang dapat mendatangkan sejumlah manfaat salah satunya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata. Pada tahap selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan pembenahan fisik dimulai dengan melakukan relokasi terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan disepanjang tepi pantai Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyediakan tiga gedung bagi para pedagang kaki lima. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung dan juga masyarakat. Selain itu, pembenahan fisik juga dilakukan untuk memperindah kawasan wisata menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk

meningkatkan lebih banyak lagi jumlah wisatawan yang datang berkunjung sehingga cita-cita Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata kelas dunia dapat terwujud. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak dapat melakukan segala upaya pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran seorang diri melihat adanya keterbatasan yang dimiliki.

Namun pada prakteknya, dalam upaya melakukan pengembangan terhadap sektor wisata di Kabupaten Pangandaran masih mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Masih kurangnya perhatian *stakeholder* baik pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta/pengusaha terhadap pengembangan kawasan obyek wisata.
2. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal dan dunia industri dalam melakukan kolaborasi mengenai nilai-nilai budaya masyarakat belum efektif.
3. Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat masih belum terjalin dengan baik. Dalam hal ini dengan pedagang kaki lima (PKL) yang kini telah direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dari zona inti di kawasan Pantai Pangandaran dipindahkan ke belakang. Pindahan yang dilakukan tidak mengikuti jalur lintas wisatawan, sehingga interaksi antara pedagang

dengan pembeli atau wisatawan sulit terjalin dan menyebabkan pedangan kembali masuk ke zona inti. Hal ini membuat relokasi PKL dan tempat parkir yang telah dilaksanakan dan telah menghabiskan dana yang tidak sedikit menjadi tidak terawat dan disia-siakan.

4. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antar kelembagaan di daerah karena masih adanya kesenjangan aparatur dan kewenangan yang terjadi.
5. Dukungan sumber daya manusia (*human resources*) dalam pengembangan obyek wisata belum maksimal.
6. Kurang maksimalnya komunikasi dan koordinasi yang terjadi antara pelaksana kebijakan. Seperti komunikasi dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
7. Peran serta *stakeholder* yang masih rendah dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dalam hal ini ditandai dengan minimnya partisipasi masyarakat yang bahkan cenderung acuh serta tidak ikut terlibat atau menjadi bagian dalam proses pengembangan pariwisata.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan promosi secara terintegrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun *stakeholder* lainnya seperti media, masyarakat maupun pengusaha. Hal ini ditandai dengan belum adanya pusat

informasi yang terencana sehingga penyebaran promosi hanya dilaksanakan oleh masing-masing pihak (Triana, 2018)

Melihat masih banyak kendala yang dihadapi Kabupaten Pangandaran dalam upaya penembangan obyek wisata seperti yang tertera di atas, maka konsep *Collaborative Governance* menjadi bagian yang sangat penting untuk menunjang sebuah pembangunan karena dengan adanya kolaborasi yang baik antar *stakeholder* dapat mendorong Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia. Selain pentingnya kolaborasi yang dilakukan, adanya peran dari masing-masing *stakeholder* seperti Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, masyarakat, swasta, media dan perguruan tinggi dalam upaya pengembangan wisata Pantai Pangandaran juga dinilai sangat penting.

Selain terkenal dengan kawasan wisata yang dimiliki, Kabupaten Pangandaran juga dikenal dengan adanya kehidupan sosial dan kebudayaan yang masih melekat di lingkungan masyarakat. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pangandaran merupakan daerah yang memiliki percampuran dua budaya yaitu budaya Jawa dan Sunda. Ini ditandai dengan Kabupaten Pangandaran bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Cilacap yang merupakan daerah dengan budaya Jawa. Sementara Kabupaten Pangandaran bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, dan bagian Baratnya berbatasan dengan Kabupaten

Tasikmalaya di mana kedua daerah tersebut merupakan daerah dengan budaya Sunda. Maka dari itu, terciptalah kedua budaya Jawa dan Sunda di Kabupaten Pangandaran yang berpengaruh terhadap kekhasan daerah, kehidupan sosial serta pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Diaspora yang terjadi di Kabupaten Pangandaran ini memiliki pengaruh besar mengenai terbentuknya suatu kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Kabupaten Pangandaran, baik dari kebudayaan masyarakatnya, bahasa yang digunakan, bentuk kesenian, ragam gerak kesenian, ataupun nama kesenian yang ada. Hal ini menjadikan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran memiliki program prioritas mengenai kebudayaan. Adanya aktifitas wisata dan kebudayaan ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* yang tercipta antar *stakeholder* yang terlibat dalam melakukan pengembangan kawasan wisata Pangandaran dengan judul “Upaya Pengembangan Kabupaten Pangandaran Menjadi Tujuan Wisata Kelas Dunia Berbasis Sosial Budaya Dalam Perspektif *Collaborative Governance*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pengembangan Kabupaten Pangandaran Menjadi Tujuan Wisata Kelas Dunia Berbasis Sosial Budaya Dalam Perspektif *Collaborative Governance*?
2. Bagaimana Peran *Stakeholder* Dalam Upaya Pengembangan Kabupaten Pangandaran Menjadi Tujuan Wisata Kelas Dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengembangan Kabupaten Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis *collaborative governance* dan untuk mengetahui peran *stakeholder* yang terlibat dalam upaya pengembangan Kabupaten Pangandaran menjadi wisata kelas dunia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan upaya pengembangan obyek wisata berbasis *Collaborative Governance*. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti dalam memahami *Collaborative Governance* yang terjadi antara *Stakeholder* yang terlibat dalam melakukan upaya pengembangan Kabupaten Pangandaran menjadi wisata kelas dunia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan *stakeholder* lainnya dalam melakukan upaya pengembangan Kabupaten Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis *Collaborative Governance*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa studi terdahulu yang akan diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tinjauan Pustaka

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
1.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Tika Mutiarawati dan Sudarmo	2015	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi dalam penanganan rob yang dilakukan oleh BAPPEDA, DPU, Fasilitator Kelurahan Senior Pekalongan Utara, Kelurahan Badegan, LPM, dan BKM Badegan dikatakan belum maksimal. Selama ini kolaborasi yang terjadi masih bersifat semiformal atau belum ada kesepakatan tertulis namun dalam praktek kolaborasi tetap berjalan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi yang terjalin masih belum maksimal dan memiliki kekurangan seperti kurangnya kepercayaan diantara partisipan, belum adanya kejelasan <i>governance</i> , pembagian akuntabilitas/responsibilitas yang tidak seimbang dan masih kurang terpenuhinya akses sumber daya.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
2.	Analisis Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana Lava Tour	Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon	2017	Dalam penelitian ini menunjukkan terdapat tiga sektor yang terlibat dalam <i>Collaborative Governance</i> yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan melakukan pengawasan serta sebagai fasilitator bagi swasta dan masyarakat. Swasta sebagai perantara antara wisatawan dan masyarakat dengan menyediakan jasa penginapan dan menyediakan paket-paket wisata dalam bentuk <i>travel tour</i> . Sedangkan masyarakat sebagai penjaja makanan dan minuman, cinderamata, pedang bunga, topi dan kain batik serta menyediakan jeep dan motor trail untuk disewakan.
3.	<i>Collaborative Governance Program One Village One Product</i> (OVOP) di Kabupaten Bantul Tahun 2016	Umi Fitriana Lestari	2017	Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa program OVOP adalah suatu program berbasis <i>Collaborative Governance</i> yang melibatkan tiga aktor yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat. Keberhasilan kolaborasi dalam penelitian ini sudah bisa berjalan sesuai indikator yang telah ditetapkan namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya seperti struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan, tingkat kepercayaan antar <i>stakeholder</i> , berbagi informasi dan sumber daya.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
4.	<i>Collaborative Governance</i> Antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Swasta Dalam Pengelolaan E- <i>Government</i>	Sri Wahyuni	2017	<p>Dalam penelitian ini menggunakan empat indikator <i>Collaborative Governane</i> yaitu <i>starting condition</i>, <i>facilitative leadership</i>, <i>institutional design</i> dan <i>collaborative proses</i>. Dalam <i>starting condition</i>, kondisi awal adanya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan <i>Combine Resource Institution</i> berawal dari masyarakat yang berinovasi ingin membuat akses <i>online</i> untuk menyimpan data-data serta dokumen desa agar dapat diakses dimanapun. Dalam indikator <i>facilitative leadership</i> program Sistem Informasi Desa (SID) belum ada yang bertanggungjawab secara pasti antara Diskominfo, Bapeda, Disdukcapil, DPPKBPM atau Administrasi Pemerintah Desa. Indikator <i>institutional design</i> dalam proses kolaborasi ini belum berjalan dengan benar karena masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan. Sedangkan indikator <i>collaborative proses</i>, menunjukkan bahwa program SID belum berjalan maksimal karena kurangnya sinergitas antara Pemkab dengan Pemerintah Desa juga dengan <i>Combine Resource Institution</i>.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
5.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Banyumas	Denok Kurniasih, Paulus Israwan Setyoko dan Moh. Imron	2017	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model kelembagaan yang digunakan masih menggunakan model <i>top-down</i> sehingga proses perencanaan kelembagaan tidak melibatkan masyarakat secara optimal. Hal ini ditandai dengan masih lemahnya sistem manajemen kelembagaan SLBM yang menyebabkan implementasi program tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan berbasis <i>collaborative governance</i>. Pembahasan mengenai <i>collaborative governance</i> dalam penelitian ini dirinci menjadi tiga aspek kajian, yaitu: 1) Identifikasi Proses <i>Face to Face</i> Dalam Pelaksanaan Program SLBM, 2) Identifikasi Proses Negosiasi Dalam Pelaksanaan Program SLBM, dan 3) Identifikasi Proses Konsensus dalam Sistem Kelembagaan.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
6.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Agroindustri Gula Semut	Mohammad Ilham Kurniawan	2018	<p>Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan agroindustri gula semut melibatkan tiga sektor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Penelitian ini menggunakan empat indikator keberhasilan kolaborasi yaitu <i>shared vision</i> yang menunjukkan adanya tujuan bersama antar <i>stakeholder</i> dalam membuka lapangan pekerjaan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Pada indikator <i>participative</i> menunjukkan adanya partisipasi aktif antara <i>stakeholder</i> berupa pembagian tugas dan wewenang di tiap <i>win-win solution</i>. Indikator <i>network</i> menunjukkan tidak adanya hirarki diantara <i>stakeholder</i> sehingga ini berdampak positif bagi panyak pihak. Sedangkan indikator <i>partnership</i>, menunjukkan terjalinnya kemitraan antar <i>stakeholder</i> berupa kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan alat yang digunakan.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
7.	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Konservasi Mangrove Baros di Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul</p>	<p>Devi Arianti dan Lena Satlita</p>	<p>2018</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan Konservasi Mangrove Baros dilakukan dengan konsep <i>agro silvo fishery</i> sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. <i>Collaborative governance</i> yang terjadi mengedepankan prinsip pemberdayaan masyarakat guna mencapai mangrove yang lestari, sehingga masyarakat berperan sebagai aktor utama, pemerintah sebagai fasilitator serta swasta sebagai mitra antara pemerintah dan masyarakat. Namun proses <i>collaborative governance</i> belum optimal dilaksanakan, hal ini ditandai dengan adanya hambatan yang terjadi yaitu belum ada forum komunikasi, masih terdapat ego sektoral, keterbatasan sumber daya, dan keterlibatan swasta yang kurang maksimal.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
8.	Kota Layak Anak Berbasis <i>Collaborative Governance</i>	Noverman Duadji dan Novita Tresiana	2018	<p>Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah sebuah upaya Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum, kemudian ke dalam definisi, strategi, intervensi pembangunan seperti sebuah kebijakan, institusi serta program yang layak anak. Maka dari itu, untuk ketercapaian hak anak tersebut, diperlukan model <i>collaborative governance</i> dalam merumuskan kebijakan pembangunan anak, yang selama ini hal tersebut masih dilakukan secara parsial atau terpisah dan belum berintegrasi dengan kelembagaan/kelompok masyarakat lainnya, masih kurangnya melibatkan atau mengikutsertakan potensi dan jejaring kelembagaan di masyarakat. Peneliti menjelaskan semua komponen kebijakan pembangunan kota/kabupaten layak anak akan berhasil jika semua komponen kelembagaan yang ada di masyarakat melakukan sebuah komunikasi, tindakan dan kerjasama dalam mengambil keputusan publik di mana hal ini merupakan hasil dari konsensus yang dilakukan melalui proses dialog secara tatap muka.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
9.	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul</p>	<p>Fajrina Risanti dan Fransisca Winarni</p>	<p>2018</p>	<p>Dalam penelitian ini ditemukan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Pengelola desa wisata, masyarakat dan swasta (LSM, Bank serta Perguruan Tinggi) masih belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya aturan resmi yang mengatur kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan rendahnya tingkat kepercayaan antar <i>stakeholder</i> dalam melakukan pengembangan desa wisata. Selain itu, peneliti juga menemukan beberapa faktor penghambat kolaborasi diantaranya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) faktor budaya, dimana masyarakat masih menganggap wisata merupakan hal yang negatif. 2) faktor institusi, adanya ketergantungan desa wisata terhadap Dinas Pariwisata maupun swasta sehingga hal ini terkesan mendominasi. 3) faktor politik, tidak adanya regenerasi atau penggantian generasi pengelola dan pokdarwis yang mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia.

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
10.	<i>Collaborative Governance</i> Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)	Ahmad Sururi	2018	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga (3) isu yang menjadi prioritas dan strategi yang harus dilakukan dalam proses <i>Collaborative Governance</i> yaitu dalam hal dimensi struktural birokrasi, sosialisasi revitalisasi dan relokasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan Paguyuban Pedagang Keraton Surososwan Banten Lama. Proses <i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Serang dan Kota Serang dalam melakukan revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama masih memiliki berbagai macam hambatan seperti adanya permasalahan dalam relokasi PKL yang masih ingin menetap di Kawasan Cagar Budaya Banten Lama dan masih belum ingin pindah ke Kawasan Penunjang yang telah disediakan. Selain itu, masih belum tercapainya target revitalisasi infrastruktur dan belum adanya kerjasama antara <i>stakeholder</i> yang sinergis. Sehingga dalam hal ini perlu adanya keseriusan dan komitmen dari pejabat publik seperti Gubernur, Bupati dan Walikota dalam revitalisasi kawasan wisata cagar budaya Banten Lama agar dapat mengambil keputusan yang tepat.</p>

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
11.	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul	Dimas Adi Putra	2018	<p>Hasil analisis dari penelitian terkait dengan <i>Collaborative Governance</i> dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul menggunakan delapan indikator keberhasilan kolaborasi yaitu: 1) Struktur jaringan, dalam kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik antar <i>stakeholder</i> dalam menjalankan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya, namun dalam hal ini Dinas Pariwisata merupakan <i>stakeholder</i> yang memiliki kewenangan lebih dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. 2) Komitmen terhadap tujuan, dalam hal ini komitmen yang dibangun oleh BUMDes dan Pokdarwis belum berjalan dengan baik karena masing-masing <i>stakeholder</i> masih memiliki ego yang tinggi. 3) Adanya saling percaya diantara para pelaku, dalam hal ini kepercayaan antar <i>stakeholder</i> seperti dari pihak Dinas Pariwisata, BUMDes dan Pokdarwis belum berjalan dengan baik karena masih kurangnya komunikasi yang dibangun serta masih adanya ego dari para pelaku kolaborasi. 4) <i>Governance</i>, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik karena terdapat aturan yang membatasi perilaku setiap <i>stakeholder</i> beserta terdapat sanksi bagi</p>

				<p>perilaku yang menyimpang.</p> <p>5) Akses terhadap kewenangan, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan adanya SOP yang jelas dan telah disepakati bersama.</p> <p>6) Pembagian akuntabilitas / tanggung jawab, dalam indikator ini keterlibatan dari masing-masing <i>stakeholder</i> sudah dilakukan untuk berbagai keputusan ditandai dengan masing-masing <i>stakeholder</i> memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap semua keputusan atau kegiatan yang telah dijalankan.</p> <p>7) Berbagi informasi, dalam indikator ini sudah berjalan dengan baik karena adanya kemudahan akses informasi bagi para <i>stakeholder</i>.</p> <p>8) Akses terhadap sumber daya, dalam indikator ini masih belum optimal karena masih terbatasnya sumberdana yang digunakan dalam proses kolaborasi dan hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Selain itu, sumber daya manusia juga masih terbatas.</p>
--	--	--	--	--

No.	Judul	Penulis	Tahun	Ringkasan
12.	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Obyek Wisata Horti Park Lampung di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Meika Permata Sari</p>	<p>2019</p>	<p>Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek <i>Collaborative Governance</i> dengan menggunakan teori Ansel & Gash yaitu: 1) Kondisi awal, dalam indikator ini proses kolaborasi sudah dilaksanakan dengan baik dari tahap adanya lahan sebagai praktek <i>Collaborative Governance</i>, 2) Desain kelembagaan, dalam indikator ini telah berjalan dengan baik. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung sebagai <i>leading sector</i>, sebagai pendukung ITERA dalam melaksanakan riset, sebagai anggota kolaborasi PT. Primasid Andalan Utama, PT. Ewindo, serta adanya dukungan dari masyarakat Desa Sabah Balau. 3) Kepemimpinan, dalam indikator ini kepemimpinan yang dilakukan selama ini sudah berjalan dengan baik karena <i>stakeholder</i> memiliki tugas dan fungsinya dalam menjalankan kolaborasi. 4) Proses kolaborasi, dalam penelitian ini lebih menekankan pada tahap membangun kepercayaan antar <i>stakeholder</i>. Kepercayaan antar <i>stakeholder</i> sudah berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan bergabungnya para <i>stakeholder</i> dalam pengembangan wisata <i>Horti Park</i> Lampung.</p>

Berdasarkan tabel studi terdahulu di atas, persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memiliki pembahasan pokok yang sama mengenai *Collaborative Governance*. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai wisata atau kepariwisataan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis *Collaborative Governance* serta bagaimana peran *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata di Kabupaten Pangandaran ini.

F. Kerangka Teori

1. Wisata

a. Pengertian Wisata

Wisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk berlibur, maupun tujuan lain selain untuk mencari nafkah, bersifat sementara, mengunjungi suatu tempat tertentu untuk keperluan pribadi (keluarga, belanja, kesehatan, tempat hiburan atau tempat untuk bersantai lainnya) (Zaenuri, 2018)

Wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sementara) dengan tujuan untuk

mengunjungi suatu tempat dengan jadwal perjalanan yang sudah direncanakan sebelumnya. Perjalanan wisata biasanya dilakukan lebih dari 24 jam. Perjalanan wisata lebih bertujuan untuk melakukan hal-hal yang membahagiakan dan menghibur diri.

Hal ini sejalan dengan pengertian wisata yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, yang berbunyi:

Wisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Perjalanan wisata biasanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat tertentu untuk menyegarkan pikiran, bersenang-senang untuk menangkan diri dan mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya.

Berdasarkan *World Tourism Organizational* (W.T.O) telah ditetapkan berbagai bentuk perjalanan wisata yaitu untuk kesehatan (*health*), pendidikan (*education*), rekreasi (*recreation*), berlibur (*holiday*), belajar (*study*), agama (*religion*) dan olahraga (*sports*). Semua bentuk perjalanan ini merupakan perjalanan wisata dan orang yang melakukan perjalanan wisata disebut dengan wisatawan (Yoeti, 2003)

Menurut beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dalam

jangka waktu tertentu (sementara) dan terjadwal dengan berbagai tujuan namun lebih utama untuk bersenang-senang atau berlibur. Perjalanan wisata yang dilakukan biasanya menghabiskan waktu lebih dari 24 jam.

b. Pengertian Wisatawan

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisata yang dimaksud dengan wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Sehingga setiap orang yang melakukan kunjungan wisata disebut sebagai wisatawan. Adapun tujuan wisatawan ini adalah untuk pengembangan diri, melakukan rekreasi atau untuk mencari pengalaman dan mempelajari keunikan yang dimiliki oleh tempat wisata yang dikunjungi.

Menurut Yoeti (2003), suatu perjalanan dapat disebut sebagai perjalanan wisata, apabila :

- 1) Perjalanan tersebut dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain (*from one place to another places*), di luar tempat orang tersebut biasa tinggal. Perjalanan yang dilakukan minimal 24 jam atau lebih dari 24 jam.
- 2) Perjalanan yang dilakukan bertujuan semata-mata untuk bersenang-senang, tidak untuk mencari bekerja di tempat atau negara yang dikunjungi oleh pelaku wisata.

3) Orang tersebut hanya sebagai konsumen di tempat yang dikunjunginya dan uang yang digunakan untuk bertransaksi adalah uang yang dibawa tempat tinggalnya atau negara asalnya dan bukan sengaja dicari di tempat yang dikunjungi.

Jadi, wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk bersenang-senang, berlibur dan menikmati tempat wisata yang dikunjunginya untuk sementara waktu, tidak untuk menetap dan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjungi dalam jangka waktu minimal 24 jam.

c. Jenis dan Macam Wisatawan

Jenis dan macam wisatawan diklasifikasikan berdasarkan sifat perjalanan dan ruang lingkup wisata yang dilakukan, sebagai berikut :

- 1) Wisatawan asing (*foreign tourist*) adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata dengan memasuki suatu negara yang bukan negara tempat orang tersebut tinggal.
- 2) Wisatawan asing domestik (*domestic foreign tourist*) adalah orang asing yang bertempat tinggal atau berdiam disuatu negara yang melakukan

perjalanan atau kunjungan wisata di wilayah negara di mana orang tersebut tinggal.

- 3) Wisatawan dalam negeri (*domestic tourist*) adalah seorang warga negara di suatu negara yang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke tempat lain di luar tempat tinggalnya namun masih dalam batas wilayah negaranya dan tidak melewati batas negara orang tersebut tinggal.
- 4) Turis asing asli (*indigenous foreign tourist*) adalah seorang warga negara di suatu negara tertentu yang memiliki tugas atau jabatan di luar negeri, kemudian pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan atau kunjungan wisata di wilayah negaranya sendiri.
- 5) Turis transit (*transit tourist*) adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau kunjungan wisata ke suatu negara tertentu dengan menggunakan pesawat terbang atau kapal laut maupun kereta api atau kendaraan umum lainnya yang terpaksa mampir atau singgah terlebih dahulu di bandara/pelabuhan/stasiun bukan atas keinginannya sendiri.
- 6) Turis bisnis (*business tourist*) adalah seseorang yang melakukan perjalanan (baik orang asing atau

warga negara sendiri) yang melakukan perjalanan atau kunjungan untuk tujuan lain bukan untuk berwisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan bisnisnya selesai (Yoeti, 1982)

2. Pariwisata Kelas Dunia

a. *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*

Menurut *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)* dalam buku panduan yang berjudul *Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations* (2004) mendefinisikan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan, industri pariwisata, serta masyarakat lokal untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini untuk membentuk pariwisata berkelanjutan jangka panjang maka harus mengacu kepada tiga aspek atau indikator secara seimbang, yaitu indikator ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Berikut alternatif indikator pariwisata berkelanjutan dari UNWTO:

1. Indikator Ekonomi

a) Pendapatan dari pariwisata

Pendapatan dari pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) sangat penting sebagai pemasukan devisa, dan untuk menyeimbangkan neraca

pembayaran, dibandingkan dengan pengeluaran oleh orang Indonesia di luar negeri (*outbound*). Pengeluaran wisatawan nusantara (*wisnus*) juga penting, secara keseluruhan lebih banyak daripada pengeluaran semua wisman, juga dilihat dari sudut distribusinya yang lebih ekstensif. Pajak dan retribusi merupakan indikator yang lebih baik daripada hanya pengeluaran total dari wisatawan.

b) Sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan

Dalam hal ini dengan cara meningkatkan pendapatan penduduk local. Penanggulangan kemiskinan telah menjadi tujuan dan juga komitmen Pemerintah, sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai dokumen hukum. Akan tetapi, masih harus direalisasikan. Melihat kenyataan bahwa banyak daya tarik pariwisata berlokasi di atau dekat dengan daerah miskin, itu merupakan hal yang perlu dicatat. Adapun indikator yang perlu diperhatikan yaitu, (1) pertumbuhan pro penduduk miskin (*pro poor*), (2) peluang penghidupan non pertanian, (3) pengembangan usaha atau SMEs dalam mata rantai produk pariwisata, (4) pengelolaan lingkungan berkelanjutan, (5) hubungan dengan CSR (*Corporate Social*

Responsibilities), (6) lapangan kerja dan pemberdayaan, (7) pertumbuhan dan diverifikasi, (8) akses ke pasar, dan (9) sumber mata pencaharian; juga dampak langsung terhadap masyarakat miskin (penghasilan dan perbaikan pendapatan; pengembangan ekonomi lokal/pedesaan dan mata pencaharian penduduk; serta dampak baik terhadap lingkungan alami tempat masyarakat tinggal).

c) Nilai uang (*value for money*)

Dalam produk pariwisata, salah satu indikator yang telah memperbaiki Index Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Indonesia, *World Economic Forum* (WEF) atau Forum Ekonomi Dunia menyebutkan bahwa peringkat nilai uang Indonesia sangat berdaya saing.

d) Kebocoran ekonomi

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam liberalisasi ekonomi telah menciptakan ruang kebocoran yang besar. Bahkan industri pariwisata kecil pun tidak terbebas dari kebocoran sehingga hal ini dapat mengurangi manfaat ekonomi bagi Negara.

- e) Prosentase pendapatan dari pariwisata yang dianggarkan untuk konservasi

Konservasi sumberdaya alami dan budaya ini diperlukan untuk keberlanjutan pariwisata dan sumber pendanaan dapat secara langsung disumbangkan oleh pariwisata.

- f) Investasi bisnis, investasi komunitas dan pengeluaran pemerintah

Pariwisata tidak akan pernah terjadi tanpa investasi oleh sektor swasta dan sektor publik, selain itu komunitas juga perlu melakukan investasi agar pariwisata lebih dapat berkelanjutan. Investasi yang dilakukan hendaknya membuka peluang untuk menunjang penciptaan lapangan kerja dan kewira-usahaan angkatan muda dalam rantai sektor suplai, dan juga menciptakan pekerjaan yang ramah lingkungan bagi masyarakat.

- g) Struktur industri

Pariwisata berkelanjutan akan tergantung kepada kombinasi yang seimbang diantara berbagai jenis bisnis dan distribusinya.

2. Indikator Sosial Budaya

a) Kesejahteraan komunitas tuan rumah

Pemerintah berkomitmen yang tercantum di dalam undang undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden dan dokumen lainnya serta dalam peraturan pemerintah daerah.

b) Aset budaya yang berlanjut

Tak akan ada pariwisata tanpa budaya, bahkan pariwisata alam pun, implisit mencakup budaya. Aset budaya sering menjadi target kapitalistik untuk dimiliki atau dikelola secara modern. Oleh karena itu, aset budaya selalu perlu melekat pada komunitas, termasuk nilai, dan budaya dalam bentuk makanan, pakaian dan lainnya lebih dari sekedar budaya panggung semata.

c) Partisipasi komunitas

Agar diperoleh tingkat kesejahteraan bersama, maka komunitas perlu dilibatkan, tidak hanya terbatas sebagai pekerja, tetapi juga dalam memutuskan arah, perencanaan, dan sebagai penyedia jasa juga sebagai tuan rumah yang dihormati di daerahnya sendiri.

d) Kepuasan atau tidak-kepuasan lokal

Sebagaimana diindikasikan dari sikap dan reaksi. Pariwisata yang memberikan manfaat pada komunitas

akan diterima secara positif, ketidak-puasan akan membawa pada konflik atau sikap negatif terhadap bisnis, pemerintah, sesama penduduk, dan juga wisatawan.

e) Pengaruh pariwisata terhadap komunitas

Pengaruh pariwisata terhadap komunitas dapat berpengaruh terhadap sikap, manfaat sosial, perubahan gaya hidup, perumahan dan kependudukan.

f) Akses oleh penduduk setempat pada aset-aset kunci

Adanya kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat terhadap akses ke tapak tapak yang penting, halangan ekonomi, serta kepuasan terhadap tingkat akses.

g) Kesetaraan jender

Tingkat partisipasi perempuan di pasar kerja formal dan informal berada di bawah partisipasi laki-laki, meskipun akomodasi, restoran, dan jasa perorangan merupakan subsektor yang lebih mudah dimasuki oleh angkatan pekerja perempuan, semua sektor hendaknya terbuka kepada perempuan dan laki-laki dan menawarkan upah dan kondisi kerja yang setara; akan tetapi, perhatian khusus perlu diberikan

kepada jenis pekerjaan jender dalam pariwisata seperti akomodasi, restoran, dan jasa perorangan.

h) Pariwisata sex

Hal ini terkait dengan sex anak-anak dan prostitusi; pemantauan, pengawasan, pembangunan, membantu atau memberi pertolongan kepada korban atau orang yang terlibat. Indikator harus pula dikembangkan dengan mempertimbangkan pencegahan dan mekanisme rujukan / referral terkait dengan tindakan ini.

i) Pekerja anak

Perlu ditanggapi dan dilakukan pemantauan di destinasi pariwisata, karena kenyataannya mereka adalah pekerja yang tidak dibayar, khususnya di sektor informal; disamping itu juga perdagangan anak perlu dipantau demi kesejahteraan bersama.

j) Konservasi atau pusaka terbangun

Adanya tapak tapak budaya, monumen, penandaan (*tetenger*), sistem reservasi, kerusakan dan pemeliharaan terkait dengan konservasi yang ada.

k) Konservasi nilai-nilai budaya

Adanya kehidupan tradisional, jenis makanan atau cara memasak, aturan berpakaian, peristiwa budaya, kerajinan, dll.

3. Indikator Lingkungan

a) Perlindungan pada sumberdaya alami berharga

- 1) Perlindungan terhadap ekosistem yang kritis: tapak yang rentan, spesies yang terancam
- 2) Kualitas air laut: kontaminasi, persepsi tentang kualitas air
- 3) Promosi dan pemeliharaan industri pariwisata yang ramah lingkungan

b) Pengelolaan sumberdaya alami langka

- 1) Pengelolaan Energi: penghematan, efisiensi, energi terbarukan.
- 2) Perubahan Iklim dan Pariwisata: mitigasi, adaptasi, kejadian iklim ekstrim, resiko, dampak terhadap destinasi, emisi rumah kaca, transpor dan penggunaan energi.
- 3) Ketersediaan air dan konservasi: pasokan air, tarif air, daur ulang, kelangkaan.

- c) Pembatasan dampak aktivitas pariwisata
- 1) Pengolahan limbah cair: air kotor, perluasan sistem, efektivitas, pengurangan kontaminasi
 - 2) Pengelolaan sampah padat: sampah, pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, deposit, pengumpulan, bahan berbahaya.
 - 3) Pencemaran udara: kualitas, kesehatan, pencemaran dari pariwisata, persepsi wisatawan
 - 4) Pengendalian tingkat kebisingan; pengukuran, persepsi.
- d) Pengelolaan dampak visual dari fasilitas pariwisata dan infrastruktur: rona lingkungan, konstruksi, rancangan, bentang alam.
- e) Promosi pariwisata berkelanjutan untuk memastikan kepuasan konsumen, agenda pekerjaan yang layak, keuntungan bisnis pariwisata, melalui 3 pilar:
- 1) Keadilan sosial atau sosio-budaya (monumen, pusaka budaya, kelompok etnis, budaya hidup (*living culture*), kelompok penduduk asli (*indigenous*).
 - 2) Pembangunan ekonomi (pembangunan ekonomi nasional dan lokal, penciptaan lapangan kerja, dan kondisi kerja yang lebih baik)

- 3) Integritas lingkungan (ekologi yang baik, lingkungan yang baik dan sumberdaya alam yang baik)
- f) Kesehatan dan Keselamatan
- 1) Kesehatan: kesehatan masyarakat, kesehatan komunitas, keamanan makanan, kesehatan dan keselamatan pekerja yang mempertimbangkan kebutuhan khusus pekerja perempuan dan laki-laki sesuai dengan latar belakang pekerjaannya
 - 2) Mekanisme penanggulangan epidemi dan penyakit transmisi internasional seperti TB, flu burung, HIV/AIDS pada semua tingkat dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan; fasilitasi, perencanaan keadaan darurat, dampak pada pariwisata
 - 3) Keamanan wisatawan, keamanan resiko, perselisihan/kerusuhan sipil, terorisme, bencana alam, pengelolaan perencanaan tanggap darurat, fasilitasi
- g) Pengendalian tingkat aktivitas wisatawan
- 1) Pengendalian intensitas penggunaan: tekanan di tapak dan sistem, jumlah wisatawan, kesesakan (*crowding*)

- 2) Pengelolaan kegiatan (*event*): olahraga, pameran, pengendalian kesesakan/kerumunan (*International Labour Organization*, 2012)

3. Collaborative Governance

Menurut Ansell and Gash “*Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actor work collectively in distinctive way, using particular processes, to establish laws and rules for the provision of public goods*” (Ansell dan Gash, 2007). *Collaborative Governance* dapat dikatakan sebagai salah satu tipe *governance*. Dalam hal ini, aktor publik dan privat (swasta) melakukan kerjasama dengan proses dan cara tertentu yang telah ditentukan sehingga nantinya akan menghasilkan suatu barang publik seperti produk hukum, aturan dan sebuah kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan publik atau masyarakat. Dalam konsep mengenai kolaborasi ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan adanya kolaborasi atau kerjasama antar *stakeholder* untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi merupakan suatu respon dari organisasi atau institusi terkait dengan perubahan-perubahan disekitar lingkungan institusi. Seperti halnya isu-isu publik yang semakin meluas dan keluar dari batas-batas kenormalan. Banyak aktor yang terlibat dalam pembuatan keputusan, sedangkan kemampuan pemerintah daerah,

kota, dan pemerintah pusat memiliki keterbatasan. Institusi diluar pemerintah semakin meningkat serta masyarakat yang cenderung semakin kritis menuntut pemerintah untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungan eksternal. Sehingga pemerintah dituntut untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta dan masyarakat yang berkepentingan dalam kebijakan-kebijakan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat (Nurchayono, 2015).

Menurut Sullivan dan Skelcher (2002), terdapat faktor kunci untuk membangun kapasitas kolaborasi antara lain: komunikator yang terampil dan memainkan peran penting dalam membangun hubungan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama, dan membuat *link* yang kuat antara para pemangku kepentingan yang didasarkan pada kapasitas individu dan kapasitas organisasi (Zaenuri, 2016). Selain itu, terdapat enam kriteria yang penting dalam *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007), yaitu :

- a) Forum dimana forum diprakarsai oleh badan-badan publik atau lembaga.
- b) Peserta forum termasuk pelaku non-negara (lembaga privat).
- c) Peserta terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan serta tidak hanya berkonsultasi dengan lembaga publik.

- d) Forum terjadi secara resmi, terorganisir, dan bertemu secara kolektif.
- e) Forum memiliki tujuan untuk membuat keputusan dengan kesepakatan bersama atau konsensus (bahkan jika tidak mencapai konsensus pada prakteknya).
- f) Kebijakan berfokus pada kebijakan publik atau publik manajemen.

Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai kolaborasi antar *stakeholder*. Menurut Roberts (Zaenuri, 2018), kolaborasi merupakan tahapan terakhir dari jejaring yang tidak formal. Tahap awal adalah jejaring yang bersifat tidak formal yang selanjutnya berkembang melalui koordinasi, kooperasi hingga akhirnya sampai pada kolaborasi. Jejaring bersifat tidak formal, hanya sekedar bertukar informasi untuk saling menguntungkan, tidak ada saling bertukar sumber daya yang diperlukan. Sedangkan kolaborasi sudah sampai pada tahap peningkatan kapasitas organisasi secara formal untuk mencapai tujuan yang sama, kerjasama sudah terbagi mengenai sumberdaya dalam menanggung risiko, tanggung jawab, dan manfaat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 1.3

Matrix of Strategies for Working Together

<i>Type of relationship</i>	<i>Definition</i>	<i>Relationship</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Resources</i>
<i>Networking</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit</i>	<i>Informal</i>	<i>Minimal time commitment; Limited level of trust; no necessity to share turf; Information exchange is the primary focus</i>	<i>No mutual sharing of resources necessary</i>
<i>Coordinatin</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit; Altering activities to achieve a common purpose</i>	<i>Formal</i>	<i>Moderate time commitments; Moderate levels of trust; No necessity to share turf; Making access to services or resources more user friendly is the primary focus</i>	<i>No or minimal mutual sharing of resources necessary</i>
<i>Cooperating</i>	<i>Exchanging information for mutual benefit; Altering activities and sharing resources to achieve a common purpose</i>	<i>Formal</i>	<i>Substantial time commitments; High levels of trust; Significant access to each other's turf; Sharing of resources to achieve a common purpose is the primary focus</i>	<i>Moderate to extensive mutual sharing of resources and some sharing of risks, responsibilities, and rewards</i>

Type of relationship	Definition	Relationship	Characteristic	Resources
<i>Collaborating</i>	<i>Exchangng information for mutual benefit; Altering activities, sharing resources and enhancing the capacity of another to achieve a common purpose</i>	<i>Formal</i>	<i>Extensive time commitments; Very high level of trust; Extensive areas of common turf; Enhancing each other's capacity to achieve a common purpose is the primary focus</i>	<i>Full sharing of resources and full sharing of risks, responsibilities ; and rewards</i>

Sumber : Roberts (Zaenuri, 2018)

Sementara itu, Sullivan dan Skelcher menggambarkan beberapa hambatan dalam kolaborasi, seperti aturan formal yang berbeda-beda, norma-norma informal, dan sumber daya yang berbeda dari berbagai pemangku kepentingan, hal ini dapat merusak kapasitas untuk kolaborasi karena menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dan konflik bisa terjadi (Zaenuri, 2016). Syarat dasar agar *collaborative governance* dapat terwujud adalah dengan adanya visi bersama yang diyakini sebagai gambaran masa depan oleh pemangku kepentingan, dengan adanya visi yang sama maka setiap komponen memungkinkan untuk berpartisipasi dalam urusan yang disepakati bersama.

Menurut Shergold (Zaenuri, 2018) konsep *collaborative governance* merupakan suatu proses yang bersifat transformatif mulai dari hubungan yang bersifat komando hingga sampai interaksi yang bercirikan kolaborasi. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan proses transformasi kolaborasi:

Tabel 1.4
Proses Transformasi Kolaborasi

<i>Command</i>	<i>The process of centralized control - with clear lines of hierarchical authority.</i>
<i>Coordination</i>	<i>The process of collective decision making – imposed on participating institutions.</i>
<i>Cooperation</i>	<i>The process of sharing ideas and resources – for mutual benefit.</i>
<i>Collaboration</i>	<i>The process of shared creation – brokered between autonomous institutions</i>

Sumber : Shergold (Zaenuri, 2018)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada mulanya kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan yang lain bersifat komando, dimana pada tahapan ini masih bersifat hirarki dan adanya kontrol yang kuat dari pemerintah, pemangku kepentingan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap berikutnya bersifat koordinasi, dimana antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain sudah terjadi proses

pengambilan keputusan yang bersifat kolektif. Kemudian dari hubungan yang bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan yang bersifat kooperatif, dimana dalam hubungan yang bersifat kooperatif ini sudah terjadi berbagi ide dan sumberdaya untuk memperoleh manfaat bersama. Dan akhirnya di tahap akhir dari hubungan tersebut bersifat kolaboratif, di dalam tahapan akhir ini sudah terjadi hubungan sampai pada tahap berbagi kreasi yang diwujudkan dalam bentuk lembaga yang bersifat permanen dan otonom.

Sedangkan menurut Zaenuri (2018), proses *collaborative governance* dapat dimulai dari perumusan ide dan harapan bersama yang kemudian diakhiri dengan dilakukannya aktivitas kemitraan. Terdapat empat konsep *collaborative governance* sebagai berikut:

1) Membangun Visi Bersama (*Shared Vision*)

Dalam setiap organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu pasti dilandasi dengan adanya visi yang jelas. Hal tersebut juga berlaku dalam mengelola segala urusan yang melibatkan berbagai *stakeholder*. Dengan adanya visi bersama maka dapat menggerakkan suatu organisasi atau kelompok untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Demikian juga dalam konteks *collaborative governance*, dalam hal ini, visi harus dapat diterima dengan baik oleh seluruh *stakeholder* baik itu organisasi pemerintah, swasta atau masyarakat agar ketiganya mempunyai komitmen yang sama untuk mengelola suatu urusan. Menurut Senge (1996) untuk mencapai *shared vision* ini perlu adanya sebuah proses yang dimulai dari adanya visi pribadi yang kemudian dibangun menjadi visi bersama. Suatu visi dapat dikatakan benar apabila antar pribadi satu sama lain memiliki gambaran dan komitmen yang sama. Maka dengan visi tersebut dapat menghubungkan beberapa pribadi yang terikat bersama oleh suatu aspirasi umum. Alasan mengapa orang membuat visi bersama adalah karena adanya hasrat untuk terhubung dalam suatu kegiatan yang penting.

Konsep tersebut jika diterapkan dalam *governance* maka sangat tepat, hal ini dilihat dari adanya kolaborasi yang terjadi diantara ketiga pilar *governance* yang disebabkan karena adanya keterbatasan diantara ketiganya sehingga diperlukan akses sumberdaya secara bersama (Peters dan Pierre, 1998). Keterbatasan yang ada pada *stakeholder* dapat dijadikan sebagai penggerak

untuk melakukan suatu kolaborasi apabila diantara stakeholder mempunyai konsen untuk membangun visi bersama. Kesamaan visi dan dipahami oleh seluruh *stakeholder* merupakan tahapan awal dari sebuah proses *collaborative governance* (Zaenuri, 2015)

Dengan mengacu pada berbagai pendapat di atas, untuk dapat merumuskan suatu visi bersama sebagai langkah awal dari proses *collaborative governance* dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap visi masing-masing yang kemudian dirumuskan untuk menjadi visi kelompok dan akhirnya menjadi visi bersama dalam mengelola pariwisata.

2) Partisipasi (*Participative*)

Keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan pariwisata memerlukan adanya struktur yang jelas. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses *governance* dapat berlangsung. Setelah visi bersama terbentuk diantara *stakeholder* maka setiap komponen akan melakukan partisipasi secara sukarela tanpa diperintah sekalipun. Partisipasi dalam konteks *governance* tentu saja masih menyisakan dilema yaitu apakah meningkatkan bobot demokrasi atau malah akan menimbulkan dominasi kekuatan non-negara yang oleh

Dingwerth (2008) sebagaimana dikutip oleh McLaverty (2011) dalam Bevir (2011) disebut sebagai *private governance*, artinya sektor swasta yang mendominasi urusan publik yang akhirnya negara dikendalikan oleh swasta.

Menurut Widianingsih (2005) yang dikutip oleh Zaenuri (2018) sejak *governance* juga dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana keputusan dilaksanakan, maka analisis *governance* saat ini lebih berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam perencanaan berupa pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang terwujud dalam implemementasi kebijakan. Menurut OECD (2001) bahwa *governance* yang baik memiliki 8 karakteristik utama dan yang pertama adalah partisipasi, kemudian dilanjutkan dengan berorientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan inklusif, dan mengikuti aturan hukum yang ada.

Partisipasi yang berupa pelibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka teori *democratic citizenship* merupakan nilai penting yang harus dijunjung tinggi. Menurut Arnstein (1969) yang

dikutip oleh Zaenuri (2018) menegaskan bahwa partisipasi warga negara dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu *non partisipasi*, *tokenism* dan *citizen power*. Partisipasi yang sesungguhnya adalah partisipasi di mana warga negara mempunyai keterlibatan dan kekuasaan untuk ikut serta dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi antara pemerintah dan warga negara, baik sebagai pelaku ekonomi privat maupun sebagai kekuatan *civil society*, muncul dalam partisipasi yang di dalamnya terdapat *citizen power*.

Dari konsep yang dikemukakan oleh Amstein tersebut jelas sekali bahwa partisipasi merupakan tahapan penting dalam proses kolaborasi. Partisipasi yang tinggi mengarah pada terbentuknya kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam tingkatan ini kedudukan antara pemerintah dengan masyarakat adalah seimbang. Masyarakat, tidak terkecuali sektor swasta, mempunyai kekuatan untuk melakukan *bargaining* dengan pemerintah baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi sebuah program/kegiatan.

Partisipasi yang tinggi ini akan berimplikasi pada munculnya kegiatan kemitraan yang lebih erat lagi. Untuk sampai pada tingkatan kemitraan perlu adanya satu tahapan yang berfungsi sebagai prasyarat agar kemitraan dapat terwujud, yaitu adanya tahapan pembentukan proses jejaring diantara pemerintah, swasta dan masyarakat.

3) Jejaring (*Network*)

Menurut Zaenuri (2018) jejaring dapat dicapai setelah terjadinya partisipasi yang aktif dari *stakeholder*. Maka dari itu, jejaring merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan sebuah kolaborasi. Jejaring dalam konteks *governance* tentu saja merupakan proses lebih lanjut dari partisipasi yang telah tumbuh diantara ketiga pilar *governance*. Partisipasi yang sudah sampai pada *citizen power* akan mengarah pada terjalannya jejaring yang kuat.

Jejaring dalam pengelolaan pariwisata lebih menekankan pada hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dilandasi pada saling ketergantungan antar satu sama lain. Pada tahapan pembentukan jejaring ini, diantara aktor masih menganggap pengelolaan pariwisata sebagai urusan

bersama, belum sampai pada distribusi kekuasaan (Zaenuri, 2018)

Untuk membangun jejaring harus ada upaya inisiatif dari salah satu *stakeholder* yang mempunyai kepentingan sangat kuat. Inisiatif muncul bisa dalam bentuk tugas yang telah dibebankan atau juga karena memang secara rasional *stakeholder* tersebut tidak mampu untuk melakukan pekerjaan secara mandiri. Setelah ada inisiatif dan disepakati bersama maka perlu ada proses yang berkesinambungan untuk menjaga kelangsungan jejaring tersebut agar bisa ditingkatkan menjadi kemitraan (*partnership*) sebagai bentuk kerjasama yang mapan (Zaenuri, 2018)

4) Kemitraan (*Partnership*)

Fase yang paling tinggi dari kolaboratif adalah terjalannya kemitraan antar *stakeholder* yang terlibat dalam urusan pariwisata dan menurut Amstein (1969) kemitraan merupakan tingkatan yang paling tinggi dari partisipasi. Dalam hal ini, Savas (2000) mengembangkan konsep mengenai pola-pola kemitraan yang bisa dikembangkan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. pola yang dikembangkan tersebut yaitu pola-pola kemitraan dalam penyediaan pelayanan dan

pembagian jenis barang atau jasa, yang meliputi: murni barang publik (*pure public goods*), murni barang privat (*private goods*), barang tool (*tool goods*), dan barang kolektif (*collective goods*). Berikut model kelembagaan kemitraan yang dimaksud, yaitu:

1. *Government services*, dalam model ini pemerintah sepenuhnya menetapkan kebijakan, pendanaan serta penyedia pelayanan.
2. *Government vending*, dalam model ini pemerintah sebagai penyedia pelayanan, sedangkan kebijakan dan konsumen sepenuhnya berasal dari konsumen, yaitu masyarakat atau organisasi masyarakat.
3. *Intergovernment agreement*, dalam model ini dilakukan kerjasama antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya.
4. *Contract*, dalam model ini pemerintah menetapkan kebijakan dan biaya, sedangkan masyarakat menjadi konsumen saja.
5. *Franchise*, dalam model ini pemerintah menetapkan kebijakan publik, sedangkan

perusahaan swasta berperan sebagai penyedia (produsen) pelayanan, sedangkan masyarakat berperan sebagai konsumen yang harus membayar layanan publik yang dikonsumsinya. Grant, dalam model ini pemerintah dan masyarakat yang menetapkan kebijakan dan sekaligus yang membiayai pelayanan ini. Sedangkan swasta menjadi penyedia pelayanan. Biaya yang dikeluarkan pemerintah dianggap sebagai subsidi.

6. *Voucher*, dalam model ini kebijakan atau aturan main ditetapkan oleh masyarakat sebagai konsumen, sedangkan pemerintah memberikan subsidi langsung sedangkan perusahaan swasta hanya menyediakan layanan saja.
7. *Market*, dalam model ini konsumen menetapkan aturan main dan membiayai semua layanan yang disediakan, sedangkan swasta memberikan layanan. Pemerintah sama sekali tidak berperan dalam model ini.

8. *Voluntary*, dalam model ini pemerintah dan swasta tidak berperan apapun, semua penyediaan pelayanan diselenggarakan oleh lembaga masyarakat.
9. *Self service*, dalam model ini baik pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat tidak berperan apa-apa, semua penyediaan pelayanan dan pembiayaan dilakukan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan pada perspektif *collaborative governance* sebagaimana diuraikan di atas, yaitu membangun visi bersama (*shared vision*), partisipasi (*participative*), jejaring (*network*), dan kemitraan (*partnership*), maka untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi dalam penelitian ini, akan dikembangkan dengan merujuk pada konsep jejaring (*network*) dan kemitraan (*partnership*). Penelitian ini tidak menggunakan konsep *collaborative governance* berdasarkan membangun visi bersama (*shared vision*) dan partisipasi (*participative*) karena Kabupaten Pangandaran telah memiliki visi bersama yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 yaitu “Kabupaten Pangandaran Sebagai

Tujuan Wisata Kelas Dunia”. Dengan adanya visi tersebut maka sudah dapat dinilai bahwa konsep *collaborative governance* berdasarkan membangun visi bersama (*shared vision*) sudah dilaksanakan sehingga tidak perlu digunakan lagi dalam penelitian ini. Begitu juga dengan konsep *collaborative governance* berdasarkan partisipasi (*participative*) tidak digunakan dalam penelitian ini karena proses partisipasi antar *stakeholder* sudah dilaksanakan dan menunjukkan adanya partisipasi yang tinggi.

G. Definisi Konseptual

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), definisi konseptual adalah sebuah pemaknaan yang didapatkan dari konsep yang digunakan dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menggunakan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wisata

Wisata atau pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang ke luar daerah, kota atau keluar negeri yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (sementara) dan tidak berniat untuk menetap dalam waktu yang sangat lama, merupakan perjalanan yang terjadwal dengan

berbagai tujuan namun lebih utama untuk menyenangkan diri, bersenang-senang maupun berlibur di luar kegiatan rutin atau rutinitas yang biasa dilakukan. Perjalanan atau kegiatan wisata yang dilakukan biasanya menghabiskan waktu lebih dari 24 jam.

2. Pariwisata Kelas Dunia

Pariwisata kelas dunia merupakan standar pengembangan atau pembangunan berkelanjutan dibidang pariwisata yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (OPD) atau dalam bahasa *Inggris* yaitu *World Tourism Organization* (WTO). Indikator tersebut diperlukan untuk menilai pariwisata di setiap penjuru dunia dengan tolak ukur yang sama sehingga dapat ditentukan obyek wisata yang telah memenuhi kriteria pariwisata berkelanjutan menurut WTO dan dapat dikatakan sebagai pariwisata berkelas dunia.

Dalam indikator pariwisata kelas dunia menurut UNWTO terdapat 3 indikator wisata kelas dunia yang harus dipenuhi yaitu indikator ekonomi, indikator sosial budaya dan indikator lingkungan. Penelitian ini menggunakan indikator sosial budaya. Hal ini disesuaikan dengan program urusan / program wajib Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai kebudayaan. Indikator sosial budaya yang digunakan yaitu ada 6 (enam) sebagai berikut:

1) Kesejahteraan tuan rumah

Dilihat dari adanya produk hukum yang dapat menjamin kesejahteraan tuan rumah.

2) Aset budaya yang berlanjut

Dilihat dari adanya aset budaya yang berlanjut yang telah dikelola dengan baik.

3) Partisipasi komunitas

Dilihat dari adanya keterlibatan komunitas dalam pelaksanaan kegiatan pendukung terwujudnya visi bersama.

4) Kepuasan atau ketidak-kepuasan lokal

Dilihat dari adanya kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar mengenai tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi bersama.

5) Konservasi atau pusaka terbangun

Dilihat dari adanya perbaikan dan pemeliharaan terhadap benda-benda konservasi atau pusaka terbangun.

6) Konservasi nilai-nilai budaya

Dilihat dari adanya nilai-nilai budaya yang masih melekat di lingkungan masyarakat.

3. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan proses kolaborasi yang ditunjukkan dengan adanya suatu respon dari *stakeholder* terkait dengan terdapatnya berbagai isu publik yang memerlukan sebuah solusi bersama dalam proses penanganannya. Dalam proses kolaborasi ini, para *stakeholder* melakukan kerja sama antar *stakeholder* untuk menciptakan dan menyelaraskan sebuah visi bersama atau cita-cita bersama yang nantinya menghasilkan suatu barang publik (*public goods*) seperti produk hukum, aturan atau legislasi, kebijakan ataupun sebuah program yang tepat dan dapat menyelesaikan isu atau permasalahan publik yang ada sehingga kebutuhan publik atau masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam *collaborative governance* pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) konsep *collaborative governance* sebagai berikut:

1) Jejaring (*Network*)

Konsep jejaring merupakan proses lebih lanjut dari konsep partisipasi (*participative*) yang sudah berlangsung. Dalam jejaring ini lebih menekankan pada hubungan yang terjalin antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang memiliki ketergantungan satu sama lain untuk mencapai cita-cita bersama.

2) Kemitraan (*Partnership*)

Konsep kemitraan merupakan tahapan paling tinggi dari *collaborative governance*. Dalam kemitraan ini lebih menekankan pada tindak lanjut dari adanya jejaring yang telah terbentuk diantara *stakeholder*. Biasanya proses kemitraan ini memiliki kurun waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibentuk antara anggota kemitraan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada suatu karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang didefinisikan. Selain itu, definisi operasional dapat digunakan sebagai petunjuk dan pelaksanaan untuk mengukur suatu variable sehingga perlu adanya batasan penelitian dengan menggunakan indikator yang sudah ditentukan. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh (Zaenuri, 2018) sebagai berikut:

Tabel 1.5

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	No.	Sub Indikator
Konsep Collaborative Governance	Jejaring (<i>Network</i>)	1.	Adanya inisiasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk melakukan suatu jejaring atau hubungan yang didasari oleh saling ketergantungan.
		2.	Adanya kegiatan atau program pendorong pelaksanaan jejaring yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> lainnya.
		3.	Adanya jejaring yang terjadi secara berkelanjutan antar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan <i>stakeholder</i> lainnya yang terlibat.
	Kemitraan (<i>Partnership</i>)	4.	Adanya kebutuhan antara para <i>stakeholder</i> di Kabupaten Pangandaran yang memerlukan tindak lanjut melalui kemitraan sehingga melibatkan berbagai <i>stakeholder</i> yang ada dalam kemitraan tersebut.
		5.	Adanya proses kemitraan yang jelas diantara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan berbagai <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam kemitraan tersebut.
		6.	Adanya pembagian sumber daya yang jelas diantara para <i>stakeholder</i> yang melakukan kemitraan tersebut.

		7.	Adanya kesepakatan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan <i>stakeholder</i> lainnya yang terlibat dalam kemitraan dalam membuat kesepakatan mengenai lamanya kurun waktu yang disepakati dalam proses kemitraan tersebut.
		8.	Adanya institusionalisasi atau pelembagaan kemitraan yang terjadi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dengan <i>stakeholder</i> lainnya dalam bentuk wadah organisasi atau sebuah program yang akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.
		9.	Adanya peran yang jelas antar masing-masing <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam kemitraan dalam upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia.

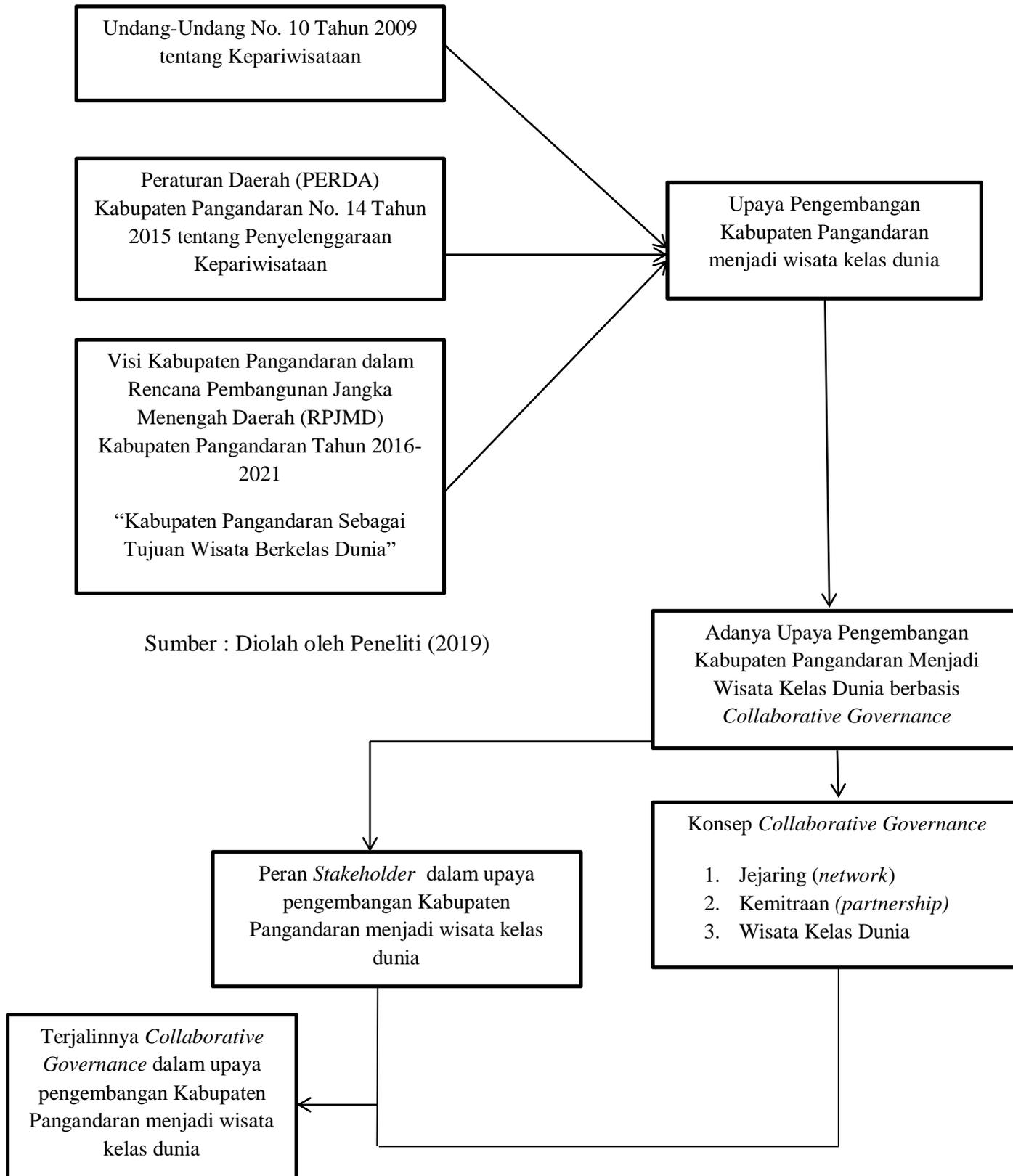
Sedangkan untuk mengetahui upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis sosial budaya dilakukan dengan mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 dan Dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang merujuk pada standar *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) menggunakan aspek sosial budaya sebagai berikut:

Tabel 1.6

Operasional Indikator Wisata Kelas Dunia

Indikator	No	Sub Indikator
<p>Indikator Wisata Kelas Dunia Menggunakan Aspek Sosial Budaya berdasarkan standar UNWTO</p>	1.	<p>Adanya undang-undang, peraturan pemerintah, intruksi presiden, peraturan pemerintah daerah serta dokumen lainnya yang menjamin kesejahteraan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pangandaran dalam melakukan pengembangan wisata kelas dunia.</p>
	2.	<p>Adanya aset dan nilai-nilai budaya dalam pariwisata yang dimiliki dan dikelola dengan baik sehingga aset budaya di Kabupaten Pangandaran selalu melekat pada seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar budaya panggung semata.</p>
	3.	<p>Adanya keterlibatan komunitas dalam memutuskan arah, perencanaan dan sebagai penyedia jasa pendukung pariwisata di Kabupaten Pangandaran untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.</p>
	4.	<p>Adanya kepuasan yang dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dengan dilakukannya pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata kelas dunia.</p>
	5.	<p>Adanya tapak budaya, monumen, penanda (<i>tetenger</i>), sistem reservasi, perbaikan jika ada kerusakan dan pemeliharaan terkait dengan konservasi yang ada di Kabupaten Pangandaran.</p>
	6.	<p>Adanya kehidupan masyarakat tradisional, jenis makanan tradisional, cara memasak yang tradisional, aturan berpakaian, peristiwa budaya dan kerajinan tradisional khas Kabupaten Pangandaran yang dilestarikan dan dapat dipamerkan kepada wisatawan</p>

I. Alur Pikir Penelitian



J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka (Sukmadinata, 2009). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2005)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk melihat fenomena, mengangkat fakta serta melihat keadaan yang ada di lapangan sehingga penelitian ini dapat melihat situasi sosial di lapangan secara mendalam. Jenis penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi mendalam terkait *Collaborative Governance* antar *stakeholder* dalam upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangandaran tepatnya di Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang beralamat di Jl. Kidang Pananjung No. 3. Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 46396. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis *Collaborative Governance*.

3. Unit Analisis Data

Menurut Hamidi (2005), unit analisis data adalah satuan yang akan diteliti, baik berupa individu, kelompok, benda ataupun suatu latar peristiwa sosial misalnya seperti aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sebagai subjek penelitian yang digunakan. Berdasarkan pengertian tersebut, unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran tepatnya pada Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisataaan Kabupaten Pangandaran.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer adalah keseluruhan informasi yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari unit analisa yang digunakan sebagai obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung ke lapangan yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.7
Data Primer Penelitian

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	<i>Collaboratie Governance</i> antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan <i>stakeholder</i> dalam upaya pengembangan Kabupaten Pangandaran menjadi tujuan wisata kelas dunia	Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata Kabupaten Pangandaran	Wawancara

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
2.	Tingkat keberhasilan <i>Collaborative Governance</i>	Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata Kabupaten Pangandaran	Wawancara
3.	Peran <i>Stakeholder</i> dalam upaya pengembangan Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia	<i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam proses <i>Collaborative Governance</i>	Wawancara

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data ini diperoleh setelah ada pengolahan terlebih dahulu artinya data tersebut berasal dari pihak kedua. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya yang diperoleh dari dokumentasi.

Tabel 1.8**Data Sekunder Penelitian**

No.	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Akses Internet	Dokumentasi
2.	Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran No. 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata	Akses Internet	Dokumentasi
3.	RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021	Web resmi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat	Dokumentasi
4.	Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Dokumentasi
5.	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Dokumentasi
6.	Perjanjian Kerjasama	Arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran	Dokumentasi
7.	Artikel/jurnal/berita media massa terkait <i>Collaborative Governance</i>	Pihak Ketiga	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik penelitian data dengan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

A. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Maksud mengadakan wawancara yang sudah ditegaskan oleh Lincon dan Guba antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntunan dan lain-lain (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa pihak, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran dan *stakeholder* di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 1.9

Daftar Narasumber Penelitian

No.	Narasumber	Jabatan
1.	Untung Saeful R, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Wawan Irawan, S.Sos	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Nita Nilamsari, S.Par	Kasubag Program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4.	Aceng Hasim, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Kebudayaan
5.	Agus Mulyana	Ketua PHRI Kab. Pangandaran
6.	Yulianto Dwi Bambang, S.E	Anggota GenPi

B. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013) dokumentasi merupakan proses untuk mendapatkan data yang akan diteliti dengan cara memperoleh data dan informasi dari buku, dokumen, jurnal, tulisan angka serta gambar yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berasal dari jurnal, website, dokumen atau arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran maupun website terkait lainnya dan berita online.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dalam mengatur urutan data kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar (Moleong, 2002). Dalam penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan dan menjelaskan secara umum keadaan di lapangan sehingga bisa disimpulkan di dalam bentuk kalimat yang tersusun rapi secara sistematis dengan adanya keterangan-keterangan yang mendukung sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepala Bidang Pengelolaan Destinasi Kepariwisata dan *stakeholder* Kabupaten Pangandaran. Data penelitian ini diperoleh dari hasil observasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Selain itu, data penelitian ini diperoleh dari dokumentasi seperti dokumen atau arsip Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan penelitian.

B. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data kasar yang didapatkan dari lapangan berupa catatan-catatan tertulis. Reduksi data dapat dilakukan agar lebih terfokus kepada *Collaborative Governance*. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemilihan data kasar yang diperoleh saat observasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Setelah data dipilah, kemudian peneliti membuat ringkasan data yang diperoleh

sebelumnya saat observasi dilakukan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

C. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sosial dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan setelah melalui proses reduksi data. Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian berupa upaya pengembangan wisata Pantai Pangandaran menjadi wisata kelas dunia berbasis *Collaborative Governance* yang sistematis dan mudah dipahami.

D. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan analisis yang terakhir. Penarikan kesimpulan diambil setelah didaparkannya data-data yang valid berkaitan dengan apa yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait dengan *Collaborative Governance* antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan *stakeholder* yang terlibat serta tingkat keberhasilan *Collaborative Governance* Pemerintah Kabupaten Pangandaran.